

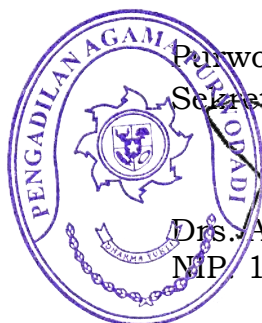
## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Purwodadi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Purwodadi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Purwodadi, 30 Juni 2020  
Sekretaris,

Drs. Ahmad Mansyur, MH  
NIP. 196309221992031003

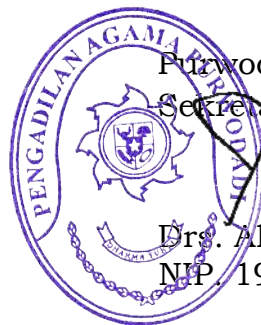
## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

**PERNYATAANTANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Purwodadi, 30 Juni 2020

Sekretaris,

*(Handwritten signature)*  
Drs. Ahmad Mansyur, MH  
NIP. 196309221992031003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi Semester I tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I tahun 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.170.576 atau mencapai 50 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.341.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.996.187.642 atau mencapai 43,38 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.212.777.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020. Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 29.266.465.126 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 31.237.700,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 29.234.614.926,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 612.500,- .

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 24.000.000,- dan Rp 29.242.465.126,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.170.576,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 4.176.682.451,- sehingga terdapat Defisit

dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 4.176.511.875,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp 0,-) dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 4.175.121.830,-)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 29.422.569.890,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 4.175.121.830,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.3.995.017.066 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 29.242.465.126.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PENGADILAN AGAMA PURWODADI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.341.000	1.170.576	50,00	3.367.768
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.341.000</b>	<b>1.170.576</b>	<b>50,00</b>	<b>3.367.768</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	7.952.986.000	3.284.859.097	50,00	9.126.782.868
Belanja Barang	B.4	123.791.000	686.328.545	50,00	808.753.404
Belanja Modal	B.5	25.000.000	25.000.000	100,00	209.100.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>8.101.777.000</b>	<b>3.996.187.642</b>	<b>49,32</b>	<b>10.144.636.272</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	7.237.700	2.424.490
Jumlah Aset Lancar		7.237.700	2.424.490
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	24.926.298.000	24.926.298.000
Peralatan dan Mesin	C.15	2.265.290.121	2.240.290.121
Gedung dan Bangunan	C.16	4.345.105.000	4.345.105.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	4.482.680	4.482.680
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.306.560.875)	(2.084.694.071)
Jumlah Aset Tetap		29.234.614.926	29.431.481.730
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(4.287.500)	(3.675.000)
Jumlah Aset Lainnya		612.500	1.225.000
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>29.242.465.126</b>	<b>29.435.131.220</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	24.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	12.561.330
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24.000.000	12.561.330
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>24.000.000</b>	<b>12.561.330</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	29.422.569.890	29.555.404.565
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>29.422.569.890</b>	<b>29.555.404.565</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>29.446.569.890</b>	<b>29.567.965.895</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## PENGADILAN AGAMA PURWODADI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.170.576	1.170.576
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.170.576</b>	<b>1.170.576</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.284.859.097	4.163.895.426
Beban Persediaan	D.3	9.022.535	3.842.315
Beban Barang dan Jasa	D.4	479.872.359	222.606.007
Beban Pemeliharaan	D.5	158.999.956	148.042.474
Beban Perjalanan Dinas	D.6	21.449.200	24.280.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	222.479.304	193.085.213
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>4.176.682.451</b>	<b>4.755.751.435</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(4.175.511.875)</b>	<b>(4.754.580.859)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		452.700	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>62.655</b>	<b>10.440</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>390.045</b>	<b>(10.440)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(4.175.121.830)</b>	<b>(4.754.591.299)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### PENGADILAN AGAMA PURWODADI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	29.422.569.890	29.555.404.565
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.175.121.830)	(4.753.591.299)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.995.017.066	4.595.273.230
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>29.242.465.126</b>	<b>29.397.086.496</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Purwodadi

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Pengadilan Agama Purwodadi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan MH. Thamrin no. 9 Purwodadi Grobogan.

Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Purwodadi berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi Yang Agung.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan

keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Purwodadi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Purwodadi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Purwodadi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan

entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Purwodadi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk



kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang

Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Purwodadi* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	7.952.986.000	7.952.986.000
Belanja Barang	1.234.791.000	1.234.791.000
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.212.777.000</b>	<b>9.212.777.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp.  
1.170.576,-*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.170.576,- atau mencapai 50,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.341.000,- Pendapatan Pengadilan Agama Purwodadi terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2.341.000	1.170.576	50,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.341.000</b>	<b>1.170.576</b>	<b>50,00</b>

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2020 sama dengan TA 2019.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	1.170.576	1.170.576	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.170.576</b>	<b>1.170.576</b>	<b>0,00</b>

*Realisasi*

*Belanja Negara*

*Rp.3.996.187.64*

*2,-*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 3.996.187.641 atau 43.38 % dari anggaran belanja sebesar Rp 9.212.777.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020*

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.952.986.000	3.284.859.097	41,30
Belanja Barang	1.234.791.000	686.328.545	55,58
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.212.777.000</b>	<b>3.996.187.642</b>	<b>43,38</b>

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami Penurunan sebesar 13.06 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2020,

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019*

REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
3.284.859.097	4.162.895.426	(21,09)
686.328.545	408.548.380	67,99
25.000.000	25.000.000	-
-	-	-
<b>3.996.187.642</b>	<b>4.596.443.806</b>	<b>(13,06)</b>

Belanja  
Pegawai Rp.  
3.284.859.097,  
-

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 3.284.859.097,- dan Rp. 4.162.895.426,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 13.04 persen dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya berkurangnya pegawai dikarenakan adanya mutasi di tahun 2020.

#### Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.284.859.097	4.162.895.426	(21,09)
Belanja Gaji pokok PNS	1.001.662.500	1.217.217.600	(17,71)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.534	14.356	(19,66)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88.003.470	104.691.140	(15,94)
Belanja Tunjangan Anak PNS	21.778.860	25.905.662	(15,93)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	24.080.000	25.030.000	(3,80)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.543.260.000	2.252.485.000	(31,49)
Belanja Tunjangan PPh PNS	433.329.133	342.337.568	26,58
Belanja Tunjangan Beras PNS	45.624.600	51.056.100	(10,64)
Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	121.834.000	141.418.000	(13,85)
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.275.000	2.740.000	92,52
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.284.859.097</b>	<b>4.162.895.426</b>	<b>(21,09)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.284.859.097</b>	<b>4.162.895.426</b>	<b>(21,09)</b>

Belanja  
Barang  
Rp.686.328.545  
,-

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 686.328.545 dan Rp.408.548.380. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan 67.99% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019.



*Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	455.525.280	180.560.283	152,28
Belanja Barang Non Operasional	0	0	-
Belanja Jasa	50.354.109	55.665.623	(9,54)
Belanja Pemeliharaan	158.999.956	148.042.474	7,40
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21.449.200	24.280.000	(11,66)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>686.328.545</b>	<b>408.548.380</b>	<b>67,99</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>686.328.545</b>	<b>408.548.380</b>	<b>67,99</b>

*Belanja Modal  
Rp. 25.000.000*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- dan Rp. 25.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 sama dengan TA 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0,00</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp.25.000.000, sama dengan TA 2019 sebesar Rp. 25.000.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	0,00
Peralatan Komputer	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0,00</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0..

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp0*

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.24.000.000*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019*

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	24.000.000	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan 2019*

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp.0*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam

jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019*

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Piutang PNBP*

*Rp.0*

**4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP TA 2020 dan 2019*

Uraian	TH 2020	TH 2019
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Bagian Lancar*

*Tagihan*

*TP/TGR*

*Rp.0*

**5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2020 dan 2019*

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
5		0	0
<b>Jumlah</b>		-	-

*Bagian Lancar  
TPA  
Rp0*

**C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2020 dan 2019*

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1			
2			
3			
4			
5		-	
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp 0*

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

*Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp.0*

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2020 dan 2019*

Jenis	TH 2020	TH 2019
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp.0*

### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima TA 2020 dan 2019*

Jenis	TH 2019	8
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan Rp.  
7.237.700*

**C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.7.237.700 dan Rp.2.424.490.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019*

Jenis	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	7.237.700	2.424.490
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.237.700</b>	<b>2.424.490</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp.0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0*

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara



karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2020 dan 2019*

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
1			-
2			
3			
4			
5			
6			
<b>Jumlah</b>		-	-

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp.0*

### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2020 dan 2019*

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
1			
2			
3			
4			
5			
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp.0*

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang

adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2020*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Tanah*

*Rp24.926.298.000*

**C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Purwodadi per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp24.926.298.000 dan Rp24.926.298.000.. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>24.926.298.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>24.926.298.000</b>

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah TA 2020*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	180m2	Jl. Merbabu Purwodadi	331.913.000
2	1,100 m2	Jl. Diponegoro No: 20 Purwodadi	6.729.392.000
3	2,800 m2	Jl. MH. Thamrin No,9 Purwodadi	17.864.993.000
			<b>24.926.298.000</b>

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp.2.265.290.121*

### **C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp.2.265.290.121 dan Rp.2.240.290.121 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>2.240.290.121</b>
Mutasi tambah:	0
Pembelian	25.000.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>2.265.290.121</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	-2.306.560.875
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>	<b>41.270.754</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian berupa *Labtop* 2 unit senilai Rp.25.000.000

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp. 4.345.105000*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp. 4.345.105.000 dan Rp. 4.345.105.000 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>4.345.105.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>4.345.105.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(222.479.314)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>	<b>4.122.625.686</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp.0*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Mutasi

transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>	-

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp4.482.680*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp.4.482.680 dan Rp.4.482.680. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>4.482.680</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>4.482.680</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>	<b>4.482.680</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 yang

Rp.0

merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.2.306.560.875*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing (Rp.2.306.560.875) dan (Rp.2.084.694.071). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2020 dan 2019*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	24.926.298.000	0	24.926.298.000
2	Peralatan dan Mesin	2.265.290.121	0	2.240.290.121
3	Gedung dan Bangunan	4.345.105.000	221.866.804	4.345.105.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5	Aset Tetap Lainnya	4.482.680	0	4.482.680
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>31.541.175.801</b>	<b>221.866.804</b>	<b>31.516.175.801</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp4.900.000*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2017 adalah Rp. 4.900.000 dan Rp. 4.900.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Purwodadi berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>4.900.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>4.900.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2020	(4.287.500)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>	<b>612.500</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2019*

Uraian	Nilai Perolehan
Shoftware	4.900.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.900.000</b>

*Aset Lain-Lain  
Rp*

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp. 4.287.500*

**C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp. 4.287.500 dan Rp. 3.675.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	4.900.000	4.287.500	612.500
<b>Jumlah</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.287.500</b>	<b>612.500</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.287.500</b>	<b>612.500</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka  
dari KPPN*

*Rp.24.000.000*

**C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.24.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp0*

**C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp12.561.330 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Purwodadi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Langganan Listrik	-	
Langganan Internet	-	
langganan air	-	
Langganan Telepon	-	
<b>Total</b>	<b>-</b>	

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp.0*

**C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0*

**C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2020 dan 2019 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA  
2020 dan TA 2019*

Uraian	TH 2020	TH 2019
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



*Ekuitas*  
*Rp.*  
*29.242.465.126*

## **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 29.242.465.126 dan Rp. 29.422.569.890. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Pendapatan*  
*PNBP Rp.0*

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Beban*  
*Pegawai*  
*Rp.3.284.859.097*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3.284.859.097 dan Rp. 4.162.895.426. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.284.859.097	4.162.895.426	-21
Belanja Gaji pokok PNS	1.001.662.500	1.217.217.600	-18
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.534	14.356	-20
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88.003.470	104.691.140	-16
Belanja Tunjangan Anak PNS	21.778.860	25.905.662	-16
Belanja Tunjangan Struktural PNS	24.080.000	25.030.000	-4
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.543.260.000	2.252.485.000	-31
Belanja Tunjangan PPh PNS	433.329.133	342.337.568	27
Belanja Tunjangan Beras PNS	45.624.600	51.056.100	-11
Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	121.834.000	141.418.000	-14
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.275.000	2.740.000	93

*Beban*

*Persediaan*

*Rp.9.022.535,-*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.9.022.535 dan Rp.3.842.315. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	9.022.535	3.842.315	135
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>9.022.535</b>	<b>3.842.315</b>	<b>135</b>

*Beban Barang*

*dan Jasa*

*Rp.479.872.35*

*9*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.479.872.359 dan Rp.222.606.007. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bulan Maret 2019. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	465.877.359	206.064.007	126,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13.250.000	16.250.000	(18,46)
Beban Jasa Pos dan Giro	745.000	292.000	155,14
<b>Jumlah</b>	<b>479.872.359</b>	<b>222.606.007</b>	<b>115,57</b>

*Beban Pemeliharaan Rp.158.999.956*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 158.999.956 dan Rp.148.042.474 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.314.088	94.077.780	(4,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.867.260	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	61.818.608	53.964.694	14,55
<b>Jumlah</b>	<b>158.999.956</b>	<b>148.042.474</b>	<b>7,40</b>

*Beban Perjalanan Dinas Rp.21.449.200*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.21.449.200 dan Rp.24.280.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	63.689.300	68.535.000	-7,07
<b>Jumlah</b>	<b>63.689.300</b>	<b>68.535.000</b>	<b>-7,07</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Purwodadi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat

selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban*

*Penyusutan dan Amortisasi Rp.222.479.314*  
4

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 222.479.314 dan Rp. 193.085.213. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan 2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	123.097.946	93.703.855	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	98.768.868	98.768.858	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>221.866.814</b>	192.472.713	-
Beban Amortisasi Software	612.500	612.500	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>612.500</b>	612.500	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>222.479.314</b>	193.085.213	-

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp.390.045,-*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	452.700	0	#DIV/0!
beban dari kegiatan non operasional lainnya	62.655	10.440	500,14
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>-390.045</b>	<b>10.440</b>	<b>(3836,06)</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa  
Rp0.*

#### **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai

berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa TA 2020 dan 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp.29.422.569.890*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.29.422.569.890 dan Rp 29.555.404.565.

*Defisit LO*

*(Rp4.175.121.830)*

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp.4.175.121.830) dan (Rp.4.753.591.299). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian*

*Nilai Aset*

*Rp0*

**E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp0*

**E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester I tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai

Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih*

**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker di Jl. MH. Thamrin No. 9 Purwodadi.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp0)*

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp.0) dan (Rp.0). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Lain-Lain Rp0*

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:



*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi*

*Antar*

*Entitas Rp.3.995.*

*017.066*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 3.995.017.066 dan Rp. 4.595.273.230. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.170.576)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.996.187.642
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.995.017.066</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp.3.996.187.642 sedangkan DKEL sebesar (Rp.1.170.576)

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	<b>Jumlah</b>		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp0 yang merupakan transfer Persediaan kepada Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir*

*Rp29.242.465.126*

## **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.29.242.465.126 dan Rp.29.397.086.496

### **A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

#### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

.

#### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 26 September 2019 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Ahmad Mansyur, MH

Pejabat Pembuat Komitmen : Ghufron, SHI

Pejabat Penandatangan/Peng  
uji SPM : Merdeka

Bendahara : Dessy Ratna Shahdra Dewi

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

**Kantor Pengadilan Agama Purwodadi  
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,  
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap  
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020**

Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
	Manfaat		Per 31-12-2017	Tahun 2018	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018
<b>Tanah</b>						
Tanah	-	24.926.298.000	-	-	-	24.926.298.000
<b>Jumlah</b>		<b>24.926.298.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.926.298.000</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>						
Alat Angkutan Darat Bermotor		419.245.328	407.601.256	11.664.072	419.245.328	-
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		8.000	8.000	-	8.000	-
Alat Ukur		24.261.000	16.551.000	2.250.000	18.801.000	5.460.000
Alat Kantor		232.231.504	116.971.904	28.027.900	144.999.804	87.231.700
Alat Rumah Tangga		602.060.827	379.216.218	55.513.000	439.615.827	162.445.000
Alat Studio		20.288.000	4.288.000	4.000.000	8.288.000	12.000.000
Alat Komunikasi		415.000	415.000	-	415.000	-
Peralatan Pemancar		100.500.000	60.300.000	10.050.000	70.350.000	30.150.000
Komputer Unit		338.778.959	249.167.735	48.376.990	297.544.725	164.134.234
Peralatan Komputer		106.558.317	70.308.061	18.577.329	88.885.390	19.672.927
<b>Jumlah</b>		<b>1.844.346.935</b>	<b>1.304.827.174</b>	<b>178.459.291</b>	<b>1.488.153.074</b>	<b>356.193.861</b>
<b>Gedung dan Bangunan</b>						
Bangunan Gedung Tempat Kerja		4.093.409.000	132.604.346	179.539.628	179.539.628	3.913.869.372
Bangunan Gedung Tempat Tinggal		251.696.000	122.765.471	17.358.344	17.358.344	234.337.656
<b>Jumlah</b>		<b>4.345.105.000</b>	<b>255.369.817</b>	<b>196.897.972</b>	<b>196.897.972</b>	<b>4.148.207.028</b>
<b>Jaringan</b>						
Jaringan Listrik			-	-	-	-
Jaringan Telepon			-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>						
Konstruksi Dalam Pengerjaan			-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aset Tetap Lainnya</b>						
Bahan Perpustakaan Tercetak		4.482.680		-	-	4.482.680
	-		-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4.482.680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.482.680</b>
<b>Total</b>		<b>31.120.232.615</b>	<b>1.560.196.991</b>	<b>375.357.263</b>	<b>1.685.051.046</b>	<b>29.435.181.569</b>

\* Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA  
PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1							
2							
3							
Jumlah				Rp	-	Rp	-